

# 5 Daerah Berindikasi Terkorup Belanja Modal Fasilitas Umum

*Jakarta, 23 Juni 2013*

Maulana

Koord. Advokasi FITRA

[maulana@seknasfitra.org](mailto:maulana@seknasfitra.org)

Pemerintah daerah masih tidak BECUS mengelola anggaran belanja modal untuk fasilitas umum. Akibatnya, BPK menemukan indikasi kerugian keuangan di daerah sebesar Rp 726, 4 Milyar dalam laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2012

Padahal, belanja modal fasilitas umum itu dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan, dan irigasi.

# Ketidakpatuhan pengelolaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan daerah

*Dalam Rupiah*

Temuan-temuan	JUMLAH KASUS	NILAI
Kerugian Daerah	730	417.889.350.000
Potensi Kerugian Daerah	273	225.878.780.000
Kekurangan Penerimaan	306	82.647.110.000
<b>TOTAL INDIKASI KERUGIAN</b>	<b>1309</b>	<b>726.415.240.000</b>

Modus : pengadaan fiktif, mark up, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak

# Modus Paling Banyak Terjadi

- kekurangan volume pekerjaan
- Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
- Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur
- denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagih atau disetor ke kas negara/daerah

Hal ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan lelang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.

Penetapan rekanan pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan dengan proses seleksi yang baik. Pemerintah daerah lebih mengedepankan penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa

# 5 Prov. Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum

*dalam rupiah*

No	Provinsi	Jml Kasus	Nilai
1	Provinsi Papua Barat	10	86.793.720.000
2	Provinsi Kalimantan Timur	2	29.631.050.000
3	Provinsi Kalimantan Selatan	8	10.841.690.000
4	Provinsi Aceh	18	7.830.770.000
5	Provinsi Maluku Utara	28	5.773.130.000

# 5 Kota Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum

*dalam rupiah*

No	Kota	Jml Kasus	Nilai
1	Kota Tebing Tinggi	6	4.906.250.000
2	Kota Ambon	13	2.452.720.000
3	Kota Denpasar	8	2.191.690.000
4	Kota Bukit Tinggi'	4	2.102.810.000
5	Kota Prabumulih	6	2.097.710.000

# 5 Kab. Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum

*dalam rupiah*

No	Kabupaten	Jml Kasus	Nilai
1	Kab. Nduga	8	89.452.480.000
2	Kab. Kepulauan Sula	40	55.065.880.000
3	Kab. Wajo	5	25.563.400.000
4	Kab. Berau	20	18.718.770.000
5	Kab. Kapuas	3	15.882.110.000

# Rekomendasi

- Memberhentikan pejabat pengadaan barang dan jasa serta kuasa pengguna anggaran yang tidak becus menyeleksi rekanan pekerjaan dalam proses PBJ.
- Kementerian keuangan membatasi dana transfer ke daerah yang berbentuk belanja modal fasilitas umum, untuk daerah-daerah yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran.